

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Periode: April – Juni 2025



**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja selama masa Triwulan II Tahun 2025 atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Laporan Kinerja ini menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Triwulan II tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan II tahun 2025 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Juli 2025
Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Jaminan Produk Halal



E.A. Chuzaemi Abidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1. Maksud	6
2. Tujuan.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	10
B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT).....	10
C. PERJANJIAN KINERJA (PK)	13
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI.....	23
B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN	54
C. HIGHLIGHT KINERJA	55
BAB IV PENUTUP.....	58
LAMPIRAN	

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. BPJPH terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal maka dibuatlah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di BPJPH.

Struktur organisasi dari Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal yang masing-masing memiliki subdirektorat di bawahnya. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH. Sedangkan, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang pengawasan JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal membawahi dua direktorat utama:

1. Direktorat Pembinaan JPH

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

2. Direktorat Pengawasan JPH

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Fungsi Pendukung

- a. Tata Usaha Deputi: Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan anggaran)
- b. Tim Teknis dan Kelompok Kerja: Mendukung pelaksanaan program strategis, evaluasi, dan pelaporan.

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki adalah sebanyak 43 Pegawai terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

5. Anggaran

Anggaran bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-142.01.1.693733/2025 yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2025 sebesar Rp. 20.015.965.000,- (Dua puluh miliar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah.)

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Tujuan dan Sasaran Program, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, pengukuran kinerja dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, serta rencana dan tindak lanjut.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Sekretariat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH mendukung misi pertama BPJPH yaitu: **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan**

Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan” Untuk mewujudkan misi tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh “tingkat literasi produk dan jasa halal”.

BPJPH telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPJPH pada tahun 2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

- **Tujuan 1:** Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
- **Tujuan 2:** Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk
- **Tujuan 3:** Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan sasaran strategis meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.
- **Tujuan 4:** Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keempat sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH berperan dalam mencapai tujuan 2, yaitu peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Adapun indikator maupun ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai, yaitu:

- 1) Tingkat literasi produk dan jasa halal; dan
- 2) Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Adapun RKT Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL**

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
			b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
			b Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
			c Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%
2	Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
			b Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			c Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
			d Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
			e Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%
3	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal	Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			b Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			c Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPJPH tahun 2025-2029 dan DIPA BPJPH Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar 10.922.419.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu), Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau

seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan unit kerja dibawahnya, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
		b	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
		b	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
		c	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT BINA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	a	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		b	Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
		c	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Bina Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		b	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		c	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
		d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
		e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi beserta anggarannya. Adapun RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai berikut:

[illegible]

2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	7161-QD01-001, Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal	TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
				60%												
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	7161-QD01-001, Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU	SUB KOMPONEN												ANGGARAN
				SUB KOMPONEN												
				SUB KOMPONEN												
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	7161-QD01-001, Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU	SUB KOMPONEN												ANGGARAN
				SUB KOMPONEN												
				SUB KOMPONEN												
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	7161-QD01-001, Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU	SUB KOMPONEN												ANGGARAN
				SUB KOMPONEN												
				SUB KOMPONEN												

184.751.000

141.752.000

108.047.000

827.888.000

1.051.561.000

1.000.000.000

229.272.000

357.178.000

135.794.000

51.961.000

95.900.000

103.944.000

143.680.000

648.482.000

273.072.000

5.619.627.000

430.612.000

190.445.000

793.785.000

42.470.000

363.218.000

2.511.171.000

487.516.000

217.442.000

339.720.000

342.849.000

5.067.536.000

24.523.129.000

5.067.536.000

24.523.129.000



4 Februari 2025
Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

Chusami Abidin

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT BINA JAMINAN PRODUK HALAL



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBINAAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELANGGA JAMINAN PRODUK HALAL

NO	SASARAN REGULAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	a. Persentase lembaga yang meningkatkan pembinaannya setelah dilakukan pembinaan	RINCIAN OUTPUT			KOMPOHSEN						SUB KOMPONEN			5.335.832.000
			001. Pembinaan lembaga jaminan Produk Halal						SUB KOMPONEN						
			002. Penilaian Kompetensi dan Kualifikasi Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal						SUB KOMPONEN						
			003. Pembinaan Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal - RLU						SUB KOMPONEN						
			004. Pembinaan Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal - RLU						SUB KOMPONEN						
2	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	b. Persentase lembaga yang meningkatkan pembinaannya setelah dilakukan pembinaan	RINCIAN OUTPUT			KOMPOHSEN						SUB KOMPONEN			5.619.627.000
			001. Pembinaan lembaga jaminan Produk Halal						SUB KOMPONEN						
			002. Penilaian Kompetensi dan Kualifikasi Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal						SUB KOMPONEN						
			003. Pembinaan Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal - RLU						SUB KOMPONEN						
			004. Pembinaan Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal - RLU						SUB KOMPONEN						

NO	SASARAN KEGIATAN	2. 7161.CDC.001.SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal	001. Sumber Daya Manusia yang terbiasa	B. Edukasi Halal (Halal Goes to Campus)												342.849.000									
				TARGET																					
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM PH	INDIKATOR ENERJIA PROGRAM	RINCIAN OUTPUT	NO	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	ANGGARAN								
																		KOMPONEN				SUB KOMPONEN			
																		1. 7161.CDC.001.SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal				001. Sumber Daya Manusia yang terbiasa			
TOTAL																	16.039.985.000								

Jakarta, 5 Februari 2025
Direktur Bina Jaminan Produk Halal



Hamid Farid Wodjdi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang diadukan dan diterbitkan realistik			24,17%			55,81%			70,81%			100%	4.892.240.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
2	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	b. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan produk halal dan produk yang diadukan dan diterbitkan realistik			24,17%			84,87%			88,87%			100%	3.048.630.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
3	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	c. Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar			5%			50%			13%			17%	3.042.731.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
4	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	d. Persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH			14,88%			65,25%			79%			80%	558.931.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang diadukan dan diterbitkan realistik			24,17%			55,81%			70,81%			100%	4.892.240.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
2	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	b. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan produk halal dan produk yang diadukan dan diterbitkan realistik			24,17%			84,87%			88,87%			100%	3.048.630.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
3	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	c. Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar			5%			50%			13%			17%	3.042.731.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
4	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	d. Persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH			14,88%			65,25%			79%			80%	558.931.000	
		NO	RINCIAN OUTPUT													
		1.	7151.00C.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
		2.	7151.00C.002 SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH													

Lembaga JPH dan SDM Halal	7161.00C.001. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	051. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	H. Pengawasan Jasa Penyelenggaraan (Bersama Pengawas Daerah)												297.805.000
Lembaga JPH dan SDM Halal	7161.00C.002. SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH	051. Pengawasan Kepada SDM Halal	C. Pengawasan Tradisi Leluhur Aduan Masyarakat (BPPH, K/L Lain, Sangat Daerah)												259.058.000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGKARAN
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	e. Persentase Pegawai JPH yang mendapat pembinaan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	942.620.000
			30%												
			73,67%												
			75%												
			SUB KOMPONEN												
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	1. 7161.00C.001. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	KOMPONEN												86.873.000 115.160.000 387.515.000 130.987.000 238.085.000 8.483.144,00
			051. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												
			B. Harmonisasi Badan Fungsional Pengawas JPH												
			C. Pembekalan dan Uji Kompetensi Calon Pengawas JPH												
			D. Pendidikan Teknis Pengawasan JPH bagi Pengawas Daerah												
E. Sosialisasi Pedoman Pengawasan JPH															
F. Biaya Pengawas Daerah															
TOTAL															

Jakarta, 5 Februari 2025
Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$
Baik	$=100\%$
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$
Kurang	$<70\%$

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program antara lain sebagai berikut:

1. **Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Jaminan Produk Halal**
 - a. **Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti**

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan II (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%	546 tindak lanjut rekomendasi	546 tindak lanjut rekomendasi	100%

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH adalah tindak lanjut dari hasil pengawasan berupa saran, instruksi, atau arahan tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH kepada pihak yang diawasi berdasarkan temuan hasil pengawasan. Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti adalah jumlah dari total rekomendasi hasil pengawasan JPH yang telah mendapatkan tindak lanjut. Semakin tinggi rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti maka semakin tinggi efektivitas pengawasan Jaminan Produk Halal yang berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap produk halal yang beredar di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 100% atau sebanyak 546 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan sudah di realisasikan sebesar 546 rekomendasi yang ditindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan dari kegiatan pengawasan dengan capaian sebesar 100%. Pengukuran terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi berasal dari kegiatan Pengawasan LP3H, Pengawasan jasa penyembelihan, pengawasan pelaku usaha dan pengawasan terhadap Pendamping proses produk halal.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan JPH telah ditetapkan target sebesar 100% pada akhir tahun 2025. Target untuk Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 546 tindaklanjuti rekomendasi atau sebesar 100%. Realisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar 546 tindaklanjuti rekomendasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	Target	0	100%
	Capaian	0	100%

Capaian pada triwulan II telah melampaui target yang ditetapkan, serta melebihi target dan capaian pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase rekomendasi hasil Pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) pengawasan pelaku usaha dan produk;
- b) pengawasan Pendamping Proses Produk Halal;
- c) pengawasan jasa penjualan;
- d) pengawasan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal; dan
- e) pengawasan jasa penyembelihan.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum adanya sistem pelacakan (*tracking system*) yang otomatis untuk memantau status perbaikan setelah laporan hasil pengawasan diberikan;
- ii. pelaku usaha seringkali kesulitan memahami cara teknis memperbaiki temuan (misalnya: cara mengganti bahan baku kritis atau memperbaiki alur produksi) tanpa bimbingan mendalam; dan
- iii. pelaksanaan pengawasan terpadu lintas kementerian dan lembaga (K/L) masih menghadapi hambatan dalam hal sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. pengembangan dasbor "*Halal Compliance Tracking*" untuk memantau status rekomendasi (*Open, In Progress, dan Closed*);
- ii. membuat panduan langkah-demi-langkah bagi pelaku usaha tentang cara melakukan perbaikan atas temuan yang paling sering muncul; dan
- iii. melakukan pertemuan koordinasi untuk menyelaraskan jadwal pengawasan antar-K/L. Dengan adanya lini masa yang disepakati bersama, benturan jadwal antarinstansi dapat diminimalisir dan alokasi sumber daya dapat dioptimalkan.

b. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%	1120 Pelaku Usaha/ Lembaga	522 Lembaga	27,96%

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH adalah suatu kondisi di mana pelaku usaha dan lembaga JPH (LPH dan LP3H) yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Persentase kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga terhadap Penyelenggaraan JPH adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan lembaga dalam memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Kepatuhan dinilai berdasarkan hasil kegiatan pengawasan JPH. Semakin tinggi persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga, maka semakin efektif pengawasan JPH. Hal ini dapat mengurangi potensi pelanggaran dan risiko ketidaksesuaian terhadap standar halal dan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk halal di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target

indikator kinerja sebesar 60%. Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH telah mencapai 522 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 27,96%. Pengukuran dilakukan terhadap 522 Pendamping Proses Produk Halal yang telah diawasi oleh tim pengawas LP3H di Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 1120 Pelaku Usaha/Lembaga pada akhir tahun 2025. Realisasi triwulan II tahun 2025 telah tercapai sebanyak 522 Pendamping Proses Produk Halal dengan capaian kinerja sebesar 27,96%, namun belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 30% berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	Target	0	30%
	Capaian	0	27,96%

Pada Triwulan II tahun 2025, indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan II. Capaian triwulan II telah melebihi target dan capaian pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya target pada Triwulan II adalah melaksanakan pengawasan terhadap 522 pendamping proses produk halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. kurangnya pengetahuan dalam mengimplementasikan SJPH; dan
- ii. variatifnya kesiapan LPH dan LP3H dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi halal.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. pelaksanaan pembinaan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengetahuan SDM dalam mengimplementasikan SJPH; dan
- ii. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta sosialisasi regulasi terkait untuk Auditor Halal dan P3H.

2. **Sasaran Program Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal**

a. **Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kinerjanya**

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	a	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%	120 Lembaga	-	-

1) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kinerjanya**

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari LPH, LP3H, dan LPP JPH. Jumlah lembaga penyelenggara JPH yang menunjukkan peningkatan kinerja dinilai berdasarkan skor peningkatan kinerja lembaga dalam kurun waktu satu tahun. Semakin tinggi tingkat literasi halal, semakin baik pula pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal serta semakin besar keterlibatan mereka

dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga. Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya belum terdapat realisasi, sehingga capaian indikator kinerja masih belum dapat dilakukan perhitungan. Pelaksanaan indikator pada Triwulan II tahun 2025 masih berada dalam tahap pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga JPH, sedangkan perhitungan persentase lembaga yang meningkat kinerjanya masih dalam pembahasan internal.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga pada akhir tahun 2025, namun pada triwulan II belum terdapat realisasi yang memenuhi target sebesar 30% berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	Target	0	30%
	Capaian	0	0

Pada Triwulan II tahun 2025, belum terdapat capaian yang mencapai target sebesar 30%. Perbandingan triwulan II dengan triwulan I tidak dapat ditentukan karena belum terdapat realisasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat koordinasi pembinaan LPH utama;
- b) visitasi lembaga pelaksana pelatihan JPH; dan
- c) pembinaan LP3H, registrasi LP3H, dan registrasi P3H.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum tersusunnya program kerja dan instrumen Evaluasi Peningkatan Kinerja bagi Lembaga JPH terbina; dan
- ii. perumusan kebijakan belum komprehensif sehingga berdampak pada pengukuran indikator kinerja yang belum terlaksana.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan rapat pembahasan terkait program kerja dan evaluasi yang akan dijalankan dalam pengukuran indikator kinerja; dan
- ii. rapat koordinasi dengan internal pimpinan dan tim pembinaan terkait arah kebijakan yang selaras dengan indikator kinerja.

b. Persentase SDM Halal yang Berkompeten

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	b	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%	139 SDM Halal	105 SDM Halal	45,32%

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Berkompeten

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran dalam penyelenggaraan JPH, yang terdiri dari auditor halal, pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal dan penyelia halal. Sumber Daya Manusia (SDM) halal yang telah dinyatakan kompeten dapat dilihat melalui instrumen penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal yang sesuai bidangnya. Semakin tinggi persentase SDM Halal yang berkompeten maka mencerminkan penyelenggaraan JPH dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai standar nasional/internasional. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal. Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator kinerja Persentase SDM Halal yang berkompeten telah

mencapai realisasi sebesar 105 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 45,32%. Capaian tersebut melampaui target indikator kinerja triwulan II pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pengukuran berdasarkan jumlah Juru Sembelih Halal yang melakukan uji kompetensi pada kegiatan tersebut sehingga didapatkan SDM Halal yang kompeten.

2) Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal pada akhir tahun 2025. Realisasi triwulan II yang dicapai untuk persentase SDM Halal yang berkompeten sebesar 105 SDM Halal dengan capaian sebesar 45,32% yang dimana melebihi target 30% triwulan II pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	Target	0	30%
	Capaian	0	45,32%

Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi telah mencapai 105 SDM Halal atau dengan capaian sebesar 45,32%. Capaian tersebut melebihi target 30% dari yang telah ditentukan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian triwulan II telah meningkat melebihi target dan capaian pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja pada Triwulan II adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi juru sembelih halal

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum terdapat pembahasan program terkait pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten; dan
- ii. belum terdapat kesamaan persepsi di internal lembaga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan rapat pembahasan terkait program yang akan dijalankan; dan
- ii. rapat koordinasi dengan internal pimpinan dan tim pembinaan.

c. Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan II (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	c Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%	53 Kota/ Kabupaten	25 Kota/ Kabupaten	42,45%

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Gerakan Sadar Halal adalah suatu inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal, penerapan sistem Jaminan Produk Halal dan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Gerakan ini diwujudkan melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, promosi, dan kolaboratif. Daerah yang terlibat dalam Gerakan Sadar Halal adalah kabupaten/kota di Indonesia yang secara aktif dan nyata berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, atau memfasilitasi kegiatan Gerakan Sadar Halal di

wilayahnya. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin luas jangkauan pelaksanaan gerakan sadar halal di tingkat daerah, sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 90% atau sebanyak 53 Kota/Kabupaten. Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah mencapai realisasi sebanyak 25 kota/kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 42,45%. Pelaksanaan indikator ini dilakukan pada program Literasi Sadar Halal pada 25 titik lokasi kota/kabupaten di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, Riau, NTB, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah ditetapkan target sebesar 90% atau sebanyak 53 kota/kabupaten pada akhir tahun 2025. Realisasi yang telah dicapai pada triwulan II sebesar 25 kota/kabupaten dengan capaian sebesar 42,45%. Capaian triwulan II sebesar 42,45% tidak mencapai target yang telah ditentukan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 45%.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	0	45%
	Capaian	0	42,45%

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian sebesar 42,45% belum mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 45%. Capaian triwulan II telah melebihi target dan capaian pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II adalah pelaksanaan program Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat. Titik lokasi kota/kabupaten yang dilibatkan program Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a) 4 titik Kab. Tangerang;
 - b) 2 titik Kota Jakarta Utara;
 - c) 3 titik Kota Jakarta Barat;
 - d) 2 titik Kota Jakarta Pusat;
 - e) 1 titik Kota Jakarta Selatan;
 - f) 2 titik Kabupaten Rokan Hulu;
 - g) 2 titik Kota Bima;
 - h) 2 titik Kab. Sumbawa;
 - i) 3 titik Kab. Lombok Timur;
 - j) 1 titik Kota Mataram;
 - k) 1 titik Kota Bengkulu;
 - l) 1 titik Sili;
 - m) 1 titik Kab. Donggala; dan
 - n) 1 titik Kab. Ogan Ilir.
- 6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi
- a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum tersedianya *timeline* program kerja di setiap bulannya; dan
 - ii. pembagian sumber daya manusia belum optimal, sehingga terdapat kendala dalam penanggung jawab titik lokasi.
- b) Tindak Lanjut Rekomendasi
- Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:
- i. melakukan rapat pembahasan terkait program kerja yang akan dilaksanakan antar internal dan eksternal; dan
 - ii. rapat koordinasi antar internal pimpinan dan tim terkait penyelesaian pekerjaan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran program, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah menetapkan target pada setiap indikator kinerja dalam sasaran kegiatan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan

Produk Halal. Pencapaian indikator kinerja dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	100 lembaga	68 lembaga	47,60%
	b Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	55 kelompok masyarakat	14 kelompok masyarakat	17,82%
	c Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	20 lembaga	6 lembaga	21,00%

a. Persentase Lembaga yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

- 1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jumlah lembaga yang meningkat pemahamannya setelah

dilakukan pembinaan menunjukkan efektivitas program pembinaan dalam meningkatkan literasi JPH dan kapasitas lembaga terkait. Semakin tinggi persentase pemahaman lembaga yang telah terbina menunjukkan bahwa semakin efektif dalam melaksanakan pembinaan JPH. Peningkatan pemahaman ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan lembaga JPH secara profesional, kredibel dan sesuai standar yang berlaku.

Capaian indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur melalui jumlah lembaga JPH (Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH (LPP JPH), dan Lembaga Keagamaan yang meningkat pemahamannya dibagi dengan jumlah lembaga JPH yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Target kinerja untuk indikator persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan pada tahun 2025 sebesar 70% atau sebanyak 100 lembaga. Pada Triwulan II, indikator ini telah direalisasikan sebesar 57 lembaga pada triwulan II yang ditambah dengan realisasi triwulan I sebesar 11 lembaga, sehingga menghasilkan capaian sebesar 47,60% pada triwulan II. Capaian ini sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan II. Realisasi ini diperoleh dari antara lain sebagai berikut:

a) LP3H

Pada triwulan II sudah dilaksanakan:

- i. pembinaan dan monitoring kepada 9 LP3H yaitu Universitas Negeri Padang, Pusat Kajian Halal LDPM, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Al Jam'iyatul Washliyah, Halal Center Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, LSH PW ISNU JATIM, Yayasan As Salaam Jayapura dan 23 LP3H pada titik lokasi DKI Jakarta;
- ii. registrasi pada 16 calon LP3H baru yaitu, Lembaga Pendidikan dan Sosial PP Bustanul Hidayah, Yayasan Pendidikan Islam Al-Husnayain, Halal Hub Yayasan Pinbuk Indonesia, Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, Yayasan Al-Haromain, Universitas Islam Indonesia, Halal Center Yayasan Widya Gara, Yayasan Paradigma, GP ANSOR Lampung, Yayasan Insan Rabbani Global; dan
- iii. registrasi P3H baru sebanyak 8.322 P3H setelah melakukan pelatihan mandiri atau LMS.

b) LPH

Pada Triwulan II belum dilaksanakan pembinaan terhadap LPH dikarenakan masih dalam tahap persiapan koordinasi pembinaan terhadap 25 LPH utama.

c) LPP JPH

Pada Triwulan II sudah dilaksanakan pembinaan kepada LPP JPH melalui Visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH ke 7 Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH, diantaranya Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, LPK Nusa Academy, Pusbangkom Kemenag RI, Lembaga Pelatihan Telkom Bandung, Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia, dan Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH Universitas Ary Ginanjar.

d) Lembaga Keagamaan

Pada Triwulan II sudah dilaksanakan pembinaan kepada 12 lembaga keagamaan melalui sosialisasi regulasi Jaminan Produk Halal. Lembaga-lembaga tersebut adalah PC Al Irsyad Jakarta Utara, PC Al Irsyad Jakarta Timur, PC Al Irsyad Jakarta Barat, PC Al Irsyad Jakarta Selatan, PC Al Irsyad Jakarta Pusat, PC Al Irsyad Bogor, PC Al Irsyad Cirebon, Markas Tadarus Indonesia, MDT Depok, LASNAZ Al Irsyad, Wanita Al Irsyad, dan Wanitas Indonesia.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 100 lembaga atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025. Realisasi pada Triwulan I sebanyak 11 lembaga dengan penambahan pada triwulan II sebanyak 57 lembaga, sehingga total realisasi triwulan II sebanyak 68 lembaga. Capaian kinerja yang telah dilakukan perhitungan sebesar 47,60% pada triwulan II yang telah sesuai dengan target sebesar 47,60% pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan II.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	7,70%	47,60%
	Capaian	7,70%	47,60%

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian sebesar 47,60 % yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 47,60%. Capaian triwulan II telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, sehingga terjadi

peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) rapat koordinasi pembinaan LPH utama;
- b) visitasi lembaga pelaksana pelatihan JPH;
- c) monitoring pelatihan LP3H dan visitasi calon LP3H; dan
- d) literasi halal bagi lembaga keagamaan.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 adalah kesiapan LPH dan LP3H dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, dan lembaga pendukung lainnya guna memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal.

b. Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal (Juleha) dan penyelia halal. Jumlah SDM yang meningkat

pemahamannya menggambarkan jumlah SDM yang memiliki peningkatan pemahaman tentang regulasi, sistem, dan prosedur Jaminan Produk Halal setelah mengikuti pembinaan. Peningkatan pemahaman diukur melalui instrumen penilaian kepada SDM Halal sebelum dan sesudah pembinaan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan.

Semakin tinggi persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan keberhasilan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa SDM Halal semakin profesional dan siap menjalankan tugas penyelenggaraan JPH secara efektif. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 55 kelompok dengan persentase sebesar 70%. Pada Triwulan II, indikator ini telah mencapai realisasi sebesar 14 kelompok masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 17,82%. Pelaksanaan indikator tersebut pada triwulan II dilaksanakan melalui program literasi sadar halal bagi kelompok masyarakat yang diantaranya sebagai berikut:

- a) 1 kelompok masyarakat di Provinsi Bengkulu;
- b) 7 kelompok masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, NTB, dan Riau; dan
- c) 6 kelompok masyarakat di Provinsi NTB, Sulawesi Tengah, dan Riau

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 55 kelompok atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan II sebesar 14 kelompok masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 17,82%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	5%	17,82%
	Capaian	0	17,82%

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian sebesar 17,82% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 17,82%. Capaian triwulan II telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) pelaksanaan program Literasi Sadar Halal; dan
- b) persiapan program Pembinaan Auditor Halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum adanya pembahasan konsep dan program Pembinaan Auditor Halal;
- ii. proses revisi anggaran sehingga program belum bisa dijalankan; dan
- iii. penyesuaian rencana kerja di dalam tim pembinaan.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan rapat pembahasan terkait program yang akan dijalankan;
- ii. koordinasi dengan bagian perencanaan dan anggaran; dan
- iii. rapat koordinasi dengan internal pimpinan dan tim pembinaan

c. Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mengikuti pembinaan. Semakin tinggi persentase pemahaman Pelaku usaha yang telah terbina menunjukkan bahwa Pelaku Usaha memahami kewajiban sertifikat halal dan dapat menjaga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Capaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur dengan jumlah Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya dibagi dengan

jumlah pelaku usaha yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 20 lembaga dengan persentase sebesar 70%. Pada Triwulan II, belum terdapat realisasi, sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dihitung.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 20 lembaga atau dengan persentase 70% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan II belum terlaksana, sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dihitung.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	Target	21%	21%
	Capaian	6 lembaga	0

Pada Triwulan II tahun 2025, belum terdapat realisasi sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Capaian triwulan II tidak mengalami peningkatan dari triwulan I karena tidak terdapat realisasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II adalah kegiatan pembinaan pelaku usaha pada lembaga keagamaan Al Irsyad.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. sulit dalam memperoleh kurasi data Pelaku usaha pada Asosiasi maupun Dinas dan lembaga karena belum sepenuhnya terintegrasi dengan OSS BKPM karena penggunaan Aplikasi personal masing-masing daerah;
 - ii. asumsi biaya yang mahal dari Pelaku usaha saat melakukan Pengajuan Sertifikasi Halal; dan
 - iii. perubahan proyeksi anggaran akibat adanya efisiensi.
- b) Tindak Lanjut Rekomendasi
- Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:
- i. meningkatkan sinergitas dengan Dinas Daerah, Pemda dan Asosiasi Pelaku Usaha dalam memperoleh data terkait binaan Pelaku usaha sesuai dengan masing-masing aplikasi pengembang;
 - ii. memberikan sosialisasi sekaligus edukasi sesuai dengan regulasi; dan
 - iii. menyusun rencana proyeksi anggaran dengan lebih efektif.

2. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	120 lembaga	67 lembaga	55,83%
	b Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	600 lembaga	508 lembaga	84,67%
	c Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%	4 laboratorium	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
	d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%	800 SDM Halal	522 SDM Halal	52,20%
	e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%	678 pengawas	688 pengawas	76,11%

a. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Laporan dan temuan hasil pengawasan adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap lembaga berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan persentase dari laporan hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah diterbitkan rekomendasi diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga

B: Jumlah target pengawasan lembaga pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 120 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada Triwulan II, realisasi tercapai sebesar 67 lembaga yang telah diawasi, dianalisis, dan diterbitkan rekomendasi dengan capaian kinerja sebesar 55,83% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan tindak lanjut aduan dan temu wicara terhadap:

- a) 6 lembaga (LP3H LDPM, LP3H UIN Sunan Kalijaga, Temu Wicara di Blitar, Kediri, Tulungagung, Bondowoso) terkait tindak lanjut aduan;
- b) 5 lembaga (LP3H ITS dan Temu Wicara di Probolinggo, Kediri, Tulungagung, Tuban dan Blitar) terkait tindak lanjut aduan; dan
- c) 27 lembaga (temu Wicara di Blitar, Situbondo, Probolinggo dan Pengawasan pada Jasa Penyembelian di Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Masjid Jami' Almukhlisin, Masjid Izzatul Islam, Masjid Islamic Center Baiturrahmi Kota Tangerang Selatan, Masjid Jannatin Marinir Cilandak, Masjid Imam Bonjol Kompleks TNI AL, Masjid Jami' Rizqon Hasanah, RPH Kota Bekasi, Masjid Nurussaadah Jakarta Timur, Masjid Jami Nur Iman, Masjid Baitussalam, Pondok Pesantren Dipa Manggala, Masjid Istiqlal, Masjid As-Salam Jati Padang, Masjid Darussa'adah, Masjid Nurul Hasanah, Masjid Jami Al Ikhlas, Lapangan Voli Puri Serang Hijau, Majelis Taklim Masjid Nurul Huda, Masjid Agung Al Barakah Bekasi, Masjid Al Barokah Cinangka Depok, Raja Domba Depok, Musholla Al Jihad Tebet Utara, Masjid Jami Al Murthado Tanjung Barat) terkait temu wicara dan lembaga pemotongan hewan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 120 lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan II tercapai realisasi sebesar 29 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 24,17%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	Target	24,17%	55,83%
	Capaian	24,17%	55,83%

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian sebesar 55,83% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 55,83%. Capaian triwulan II telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, sehingga terjadi

peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) kegiatan TL aduan dan Temu Wicara (6 lembaga) yaitu TL Aduan LP3H LDPM, LP3H UIN Sunan Kalijaga, Temu Wicara di Blitar, Kediri, Tulungagung, Bondowoso;
- b) kegiatan TL aduan dan Temu Wicara (5 lembaga) yaitu TL Aduan LP3H ITS dan Temu Wicara di Probolinggo, Kediri, Tulungagung, Tuban dan Blitar; dan
- c) kegiatan Temu wicara dan Lembaga pemotongan hewan kurban (27 lembaga) yaitu Temu Wicara di Blitar, Situbondo, Probolinggo dan Pengawasan pada Jasa Penjual di Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Masjid Jami' Al Mukhlisin, Masjid Izzatul Islam, Masjid Islamic Center Baiturrahmi Kota Tangerang Selatan, Masjid Jannatin Marinir Cilandak, Masjid Imam Bonjol Kompleks TNI AL, Masjid Jami' Rizqon Hasanah, RPH Kota Bekasi, Masjid Nurussaadah Jakarta Timur, Masjid Jami Nur Iman, Masjid Baitussalam, Pondok Pesantren Dipa Manggala, Masjid Istiqlal, Masjid As-Salam Jati Padang, Masjid Darussa'adah, Masjid Nurul Hasanah, Masjid Jami Al Ikhlas, Lapangan Voli Puri Serang Hijau, Majelis Taklim Masjid Nurul Huda, Masjid Agung Al Barakah Bekasi, Masjid Al Barokah Cinangka Depok, Raja Domba Depok, Musholla Al Jihad Tebet Utara, Masjid Jami Al Murthado Tanjung Barat.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. minimnya pengetahuan Pelaku usaha, LPH dan LP3H di daerah terkait regulasi tentang jaminan produk halal; dan

- ii. variasi tingkat kesiapan LPH dan LP3H dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi halal.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. pelaksanaan temu wicara guna meningkatkan kapasitas pengetahuan Pelaku usaha, LPH dan LP3H terhadap regulasi; dan
- ii. peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, dan lembaga pendukung lainnya guna memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal.

b. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Produk berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan persentase dari laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk

B: Jumlah target pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 600 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada Triwulan II, realisasi tercapai sebesar 508 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 84,67% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 508 lembaga dan 870 produk.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 600

lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan II tercapai realisasi sebesar 508 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 84,67%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	Target	24,17%	84,67%
	Capaian	19,83%	84,67%

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian sebesar 84,67% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 84,67%. Capaian triwulan II telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) melakukan pengawasan terhadap 508 lembaga; dan
- b) melakukan pengawasan terhadap 870 produk.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

- a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. kurangnya pengetahuan pelaku usaha akan kesesuaian pencantuman label halal pada produk; dan
- ii. penggunaan logo halal lama (MUI), label halal tidak sesuai format BPJPH, dan nomor sertifikat halal yang tidak terdeteksi.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. sosialisasi Kepkaban 145 tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal dan Kepkaban Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepkaban Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal; dan
- ii. menerbitkan Surat Edaran kepada pelaku usaha terkait batas akhir penggunaan logo halal Majelis Ulama Indonesia.

c. **Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar**

1) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar**

Jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Semakin tinggi persentase laboratorium yang memenuhi standar, menunjukkan bahwa fasilitas laboratorium penyelenggara JPH beroperasi dengan kualitas dan standar yang sesuai. Capaian persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar menggambarkan jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Pengukuran indikator kinerja tersebut diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah laboratorium penyelenggara JPH yang telah dilakukan pembinaan

B: Jumlah target laboratorium yang dimiliki LPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 4 laboratorium dengan persentase sebesar 17%. Pada Triwulan II, belum terdapat laboratorium yang memenuhi standar, sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja pada periode ini.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar telah ditetapkan target sebesar 4 laboratorium atau dengan persentase sebesar 17% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan II tidak tercapai karena belum terdapat laboratorium yang memenuhi standar.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	Target	5%	10%
	Capaian	0	0

Pada Triwulan II tahun 2025, belum terdapat laboratorium yang memenuhi standar sehingga tidak terdapat peningkatan realisasi sejak triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) kegiatan pengujian pada ruang lingkup DNA dimana terdapat 7 Sertifikat Hasil Uji, SHU yang diterbitkan oleh laboratorium halal BPJPH menggunakan metode pengujian SNI ISO 20224-3:2020 dan SNI 9278:2024 dengan jenis sampel ayam goreng, minyak goreng, sambal dan bumbu ungkep untuk pengawasan sewaktu-waktu dan berkontribusi pada total penerbitan SHU ruang lingkup DNA sepanjang tahun 2025;

- b) kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembahasan Metode Sampling, Analisis Resiko dan Validasi Laboratorium. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis terkait metode sampling, analisis risiko, serta validasi laboratorium sebagai dasar penguatan sistem pengujian dalam pengawasan jaminan produk halal;
- c) kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Laboratorium Halal BPJPH dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia adalah melaksanakan kegiatan pelatihan verifikasi instrumen *Gas Chromatography* (GC) yang diikuti oleh 2 (dua) orang analis laboratorium; dan
- d) *in house training* verifikasi metode biologi molekuler yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang analis laboratorium

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum adanya metode pengujian yang terstandar untuk memastikan mutu dan kualitas pengujian;
- ii. kurangnya kemampuan analis laboratorium dalam melakukan pengujian;
- iii. belum adanya pedoman sampling dan pengujian yang terstandar; dan
- iv. belum adanya pedoman pengelolaan laboratorium pengujian kehalalan.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. penyusunan draft metode pengujian;
- ii. melaksanakan pelatihan untuk analis laboratorium;
- iii. menyusun Draft Pedoman Sampling dan Pengujian; dan
- iv. menetapkan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kehalalan melalui Kepkaban.

d. Persentase SDM Halal yang Mematuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Memenuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, pendamping (P3H) dan penyelia halal. Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi mencerminkan kedisiplinan dan integritas

pelaksanaan regulasi pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Semakin tinggi persentase SDM yang mematuhi regulasi, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan JPH semakin baik. Capaian indikator SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah SDM Halal yang mematuhi regulasi

B: Jumlah target SDM Halal yang terawasi pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 800 SDM Halal dengan persentase sebesar 80%. Pada Triwulan II, realisasi tercapai sebesar 522 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 52,20% yang belum sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 522 pendamping proses produk halal (P3H) dan pengawasan terhadap 52 LP3H.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 800 SDM atau dengan persentase sebesar 80% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan II tercapai realisasi sebesar 522 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 52,20%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	Target	14,48%	65,25%
	Capaian	11,90%	52,20%

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian sebesar 52,20% belum mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 65,25%. Capaian triwulan II telah melampaui target dan capaian pada triwulan I, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

- a) melakukan Pengawasan terhadap 52 LP3H; dan
- b) melakukan Pengawasan terhadap 522 Pendamping Proses Produk Halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. minimnya pengetahuan dalam mengimplementasikan SJPH;
2. variatifnya kesiapan LPH dan LP3H dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi halal; dan
3. kurangnya juru sembelih halal dan tenaga kesehatan yang bertugas memastikan pemenuhan standar halal di unit tersebut.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

1. pelaksanaan pembinaan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengetahuan SDM dalam mengimplementasikan SJPH;
2. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta sosialisasi regulasi terkait untuk Auditor Halal dan P3H;
3. pelatihan juru sembelih halal guna memastikan pemenuhan standar halal di unit terkait.

e. Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

Pengawas JPH merupakan ASN Jabatan Fungsional (JF) JPH yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal, baik usaha, lembaga penyelenggara, maupun produk halal, sesuai standar prosedur dan regulasi teknis yang berlaku. Semakin tinggi persentase pengawas yang memperoleh pembinaan, maka menunjukkan bahwa pembinaan pengawas JPH berjalan secara

sistematis dan konsisten untuk menjaga kualitas pengawasan JPH. Capaian indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapatkan pembinaan dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah JF Pengawas JPH yang mendapat pembinaan

B: Jumlah JF Pengawas JPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 678 Pengawas JPH dengan persentase sebesar 75%. Pada triwulan II, telah tercapai realisasi sebesar 688 Pengawas JPH dengan capaian sebesar 76,11%. Capaian ini telah melampaui target persentase yang ditetapkan sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan indikator ini melalui kegiatan Penetapan Permen PAN RB No 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2023 tentang JF Pengawas JPH dan Penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja JF Pengawas JPH.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan telah ditetapkan target sebesar 678 Pengawas JPH atau dengan persentase sebesar 75% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan II melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2025 yaitu sebesar 688 Pengawas JPH dengan capaian sebesar 76,11%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II
Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	Target	10%	30%
	Capaian	0	76,11%

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian sebesar 76,11% telah melampaui target triwulan II dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 30%. Capaian triwulan II telah melampaui target dan capaian pada triwulan I, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II antara lain sebagai berikut:

a) kegiatan penetapan Permen PAN RB No 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2023 tentang JF Pengawas JPH; dan

b) kegiatan penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja JF Pengawas JPH.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 adalah terbatasnya perolehan informasi yang didapatkan oleh 12 orang CPNS JF Pengawas JPH yang ditempatkan di pemerintah daerah dan diluar penempatan instansi Kementerian Agama dan BPJPH. Keterbatasan tersebut membuat pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh pengawas JPH yang aktif di tahun 2025.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

1. pembuatan *chat group whatsapp* JF Pengawas JPH seluruh Indonesia; dan
2. pembahasan untuk mendirikan asosiasi JF Pengawas JPH seluruh Indonesia.

B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah dikurangi blokir adalah sebesar Rp20.015.965.000,- (dua puluh miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Juni 2025) tercatat sebesar Rp6.167.423.129,- (enam miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), atau sebesar 30,81% dari total pagu anggaran. Dengan demikian, sisa anggaran yang masih tersedia adalah sebesar Rp13.848.541.871,-.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Juni 2025

Kementerian : 142 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Unit Organisasi : 01 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Satuan Kerja : 693733 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	20.015.965.000	0	4.639.024.760	1.528.398.369	8.167.423.129	30,81 %	13.848.541.871
DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	20.015.965.000	0	4.639.024.760	1.528.398.369	6.167.423.129	30,81 %	13.848.541.871
DC 7161 Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	20.015.965.000	0	4.639.024.760	1.528.398.369	6.167.423.129	30,81 %	13.848.541.871
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	9.633.186.000	0	1.722.431.260	972.709.070	2.695.140.330	27,98 %	6.938.045.670
QDB 001 Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	9.633.186.000	0	1.722.431.260	972.709.070	2.695.140.330	27,98 %	6.938.045.670
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2.910.385.000	0	306.057.000	181.504.200	687.561.200	23,62 %	2.222.823.800
QDC 001 SOM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal	2.910.385.000	0	306.057.000	181.504.200	687.561.200	23,62 %	2.222.823.800
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7.472.394.000	0	2.410.536.500	374.185.099	2.784.721.599	37,27 %	4.687.672.401
QIC 001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	7.472.394.000	0	2.410.536.500	374.185.099	2.784.721.599	37,27 %	4.687.672.401
QIC 002 SOM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH	3.988.449.000	0	1.632.514.000	121.482.360	1.753.996.360	43,98 %	2.234.452.640

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal hingga Triwulan II masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, dengan capaian realisasi sebesar 30,81%. Pada kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga telah terealisasi sebesar Rp2.695.140.330,- atau 27,98%, sementara kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat mencapai realisasi sebesar Rp687.561.200,- atau 23,62%. Selanjutnya, kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga mencatat realisasi sebesar Rp2.784.721.599,- atau 37,27%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih berfokus pada tahapan persiapan dan awal pelaksanaan, dan selanjutnya memerlukan percepatan pada Triwulan III dan Triwulan IV agar target realisasi anggaran akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

C. HIGHLIGHT KINERJA

Highlight Kinerja memuat capaian kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja. Terdapat beberapa program di Direktorat Bina JPH dalam mendukung tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang dapat menggambarkan efektivitas program, diantaranya:

1. Pelatihan Juru Sembelih Halal

Pelatihan Juru Sembelih Halal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan bagi juru sembelih halal. Dalam hal ini, Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pelatihan. Dengan demikian, harapan dari kegiatan pelatihan ini adalah juru sembelih halal dapat melakukan penyembelihan sesuai SKKNI yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 147 tahun 2022 sehingga menghasilkan proses penyembelihan sesuai

dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.





Dengan pembinaan yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk halal di Indonesia, menjaga integritas sistem pengawasan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk halal yang beredar di pasar.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) sasaran program. Sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti merupakan satu-satunya indikator yang memperoleh capaian kinerja 100% atau masuk ke dalam kategori SANGAT BAIK, namun untuk indikator lainnya masih berada di bawah target yang ditentukan. Sasaran program meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya belum memiliki realisasi, sehingga capaian kinerjanya belum dapat dihitung. Indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten telah melebihi target triwulan II yaitu sebesar 45,32%, sedangkan indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal masih berada di bawah target triwulan II yaitu sebesar 42,45%.

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH dengan 3 (tiga) indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

1. indikator kinerja berupa persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 47,60%;
2. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan belum terlaksananya realisasi, sehingga capaian kinerjanya sebesar 17,82%; dan
3. indikator kinerja berupa persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 21%.

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal dengan 5 (lima) indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

1. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 55,83%;
2. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 84,67%;
3. indikator kinerja berupa persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar belum terdapat realisasi pada Triwulan II, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya;

4. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH memperoleh capaian kinerja sebesar 52,20%; dan
5. indikator kinerja berupa persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 76,11%.

Beberapa indikator kinerja belum memiliki realisasi karena Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan unit kerja baru di bawah BPJPH sebagai LPNK yang masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan.